

LEBIHI DIMENSI DAN MUATAN

14 Hari Operasi Truk 'ODOL'

JAKARTA (KR) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar operasi penanganan truk yang melebihi ukuran/dimensi dan melebihi muatan atau over dimension over loading ('ODOL') serentak di seluruh Indonesia.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (10/2) mengatakan, operasi tersebut bertujuan mengurangi jumlah kendaraan ODOL hingga tahun 2023 mendatang. Operasi digelar selama 14 hari secara serentak di seluruh Indonesia dengan sanksi berupa penilangan hingga ancaman pidana.

"Proses pidananya penegakan hukum biasa, artinya harus berita acara, diinvestigasi sampai dengan putusan pengadilan, ancamannya satu tahun atau denda," jelas Aan saat meninjau operasi ODOL di ruas Jalan Tol Cikampek.

Aan menjelaskan, hampir semua kendaraan yang terjaring dalam operasi ini melanggar muatan atau over loading. Namun, ada pula beberapa kendaraan yang terjaring karena over dimension.

Bahkan kata Aan Suhanan, ada beberapa kendaraan yang mencapai 200 persen kelebihan muatannya. Misalnya, berat yang diperbolehkan 20 ton, tetapi kendaraan tersebut memiliki muatan hingga 60 ton. "Kelebihan

40 ton. Untuk pelanggaran lalu lintas kita berikan tilang, dan ada tambahan, kita turunkan muatan berlebihan," kata Aan.

Aan mengungkapkan, ODOL sebagai kejahatan lalu lintas, dimana 57 kasus kecelakaan kendaraan yang melibatkan kasus over loading sejak April hingga Desember 2021. "Selain berakibat kecelakaan, overload ini juga berakibat tingginya cost sosial. Jalan rusak, akibatnya terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta memperlambat arus dan terjadi kemacetan," kata Aan.

Sebelumnya, Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan mewujudkan komitmen zero over dimension dan over loading (ODOL) 2023 dari Banyuwangi, Jawa Timur. Komitmen itu ditandai dengan memotong kendaraan dump truck yang mengalami over dimension dengan las api di Waduk Sidodadi Glenmore oleh Dirgakkum Korlantas Brigjen Pol Aan Suhanan bersama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi.

"Tentu kami dari Kor-

lantas Polri sangat memberikan dukungan dan apresiasi karena kami bersama Kemenhub sudah mulai merealisasikan 2023 bebas ODOL," kata Aan Suhanan.

Aan mengapresiasi kegiatan ini yang sangat positif karena inisiatif dari para pengemudi. Aan menegaskan, pihaknya akan mulai merealisasikan 2023 bebas ODOL melalui berbagai kegiatan rutin yang akan ditingkatkan.

Budi Setyadi menegaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari operator kendaraan berat. Maka, pihaknya sangat mengapresiasi kesadaran para pengusaha kendaraan angkutan barang. "Biasanya inisiasi kami yang ambil. Akan tetapi, hari ini khusus di Banyuwangi, yang berinisiatif adalah operator. Artinya, teman-teman ini ingin menyesuaikan dimensi kendaraan truk sesuai dengan regulasi Pemerintah," kata Budi.

Ketua Asosiasi Pilot Project Indonesia Jaenuri mengaku hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para awak kendaraan. Selain itu, agar tidak menjadi penyebab masalah lalu lintas di jalan. "Selain mengikuti aturan dari Pemerintah, ini juga untuk menjaga kenyamanan dan keamanan sopir," ujar Jaenuri. **(Ant/San)-d**

BUDAYA PEMERINTAHAN 'SATRIYA' Ciri Khas Keistimewaan Pemerintahan di DIY



KR-Devid Permana

Podcast Rembag Kaistimewaan bertajuk 'Budaya SATRIYA Cermin Keistimewaan Pemerintahan di DIY'.

PEMERINTAH Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus memperluas penerapan budaya kerja bagi aparatur yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal DIY, yaitu Budaya Pemerintahan 'SATRIYA', singkatan dari Selaras, Akal Budi (harus luhur), Teladan (memberikan keteladanan), Rela (dalam melayani), Inovatif, Yakin (percaya diri) dan Ahli (profesional).

Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Ana Windyawati SH MH mengatakan, Budaya Pemerintahan SATRIYA ingin membentuk pola pikir (*mindset*), cara kerja, suasana kerja, perkataan, perilaku dan sikap aparatur di lingkup Pemda DIY yang SATRIYA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Budaya Pemerintahan SATRIYA ini menjadi nilai atau prinsip yang akan menuntun dan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap (*attitude*) aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi semacam kontrol bagi aparat pemerintah untuk selalu melayani dengan nilai-nilai budaya tadi (budaya pemerintahan SATRIYA). Budaya ini juga menjadi ciri khas Keistimewaan Pemerintahan di DIY

dan satu-satunya di Indonesia serta bisa diadopsi daerah lain," terang Ana dalam podcast Rembag Kaistimewaan bertajuk 'Budaya SATRIYA Cermin Keistimewaan Pemerintahan di DIY'.

Podcast Rembag Kaistimewaan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewaan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewaan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (10/2) dan ditayangkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewaan>. Kegiatan ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Rembag Kaistimewaan menghadirkan narasumber lain Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewaan DIY) dan Danang Adrianto SE (Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulonprogo) dipandu Febri Setiawan.

Menurut Ana, Budaya Pemerintahan SATRIYA telah dimulai di lingkup Pemda DIY sejak tahun 2008 dan dikuatkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2008. Tahun 2018, budaya pemerintahan ini mulai diperluas diterapkan

di pemerintah kabupaten/kota di DIY dan dikuatkan melalui Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati. "Setelah diterapkan di kabupaten dan kota, Budaya Pemerintahan SATRIYA diperluas cakupannya juga diterapkan di pemerintah kalurahan di DIY," katanya.

Aris Eko Nugroho mengatakan, dengan adanya Budaya Pemerintahan SATRIYA diharapkan lembaga di DIY menjadi lebih istimewa, sehingga budaya ini harus membumi. Menurut Aris, SATRIYA adalah watak yang jika dikaitkan dengan semangat tata nilai Keyogyakartaan selaras dengan semangat 'Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh'. "Pemda DIY berkomitmen pelayanan aparaturnya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tidak hanya di kabupaten dan kota tapi juga sampai ke bawah yaitu kalurahan," ujarnya.

Danang Adrianto menambahkan, Budaya Pemerintahan SATRIYA mulai diterapkan di Kabupaten Kulonprogo tahun 2018, diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengikat aparatur perangkat daerah, kalurahan dan BUMD. Dalam Perbup ini, perangkat daerah diwajibkan

melakukan internalisasi budaya ini di lingkup kerja masing-masing, salah satunya dengan membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP). Tugas KBP ini salah satunya menyusun rencana aksi dengan melibatkan aparatur di lingkup kerjanya.

Menurut Danang, pihaknya juga melakukan sosialisasi-sosialisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA ke perangkat daerah, aparatur dan sosialisasi ke CPNS. Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, ternyata mendapat respons positif dari perangkat daerah, salah satunya RSUD Wates yang berinisiatif mengadakan sosialisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA kepada tenaga kesehatannya setiap hari Kamis, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulonprogo juga melakukan sosialisasi 'jemput bola' ke beberapa kapanewon di Kulonprogo sekaligus mengundang kalurahan di lingkup kapanewonnya. "Sosialisasi di kapanewon ini sekaligus melihat kondisi di lapangan sejauh mana penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ini telah dijalankan," ujarnya. **(Dev)**

KASUS VARIAN OMICRON

Puncak Lonjakan Hingga Awal Maret 2022

JAKARTA (KR) - Puncak lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron diperkirakan akan terjadi hingga awal Maret 2022. Tren peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron akan lebih cepat dibandingkan lonjakan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.

"Kita akan melihat tren peningkatan sampai kita prediksi bahwa di akhir Februari atau di awal Maret 2022 ini merupakan puncak kasus Omicron yang bisa diprediksi itu 3-6 kali lebih tinggi daripada variasi Delta," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi secara daring di Jakarta, Kamis (10/2) petang.

Nadia mengatakan, meski akan terjadi lonjakan kasus, keterisian tempat tidur di rumah sakit akan terkendali. Ia menekankan, pasien Covid-19 varian Omicron yang mengalami gejala ringan atau tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri maupun isolasi terpusat yang

disediakan Pemerintah.

"Batuk, pilek, demam kemudian sakit tenggorokan dan saturasi oksigen lebih dari 95 persen serta tidak memiliki komorbid, diharapkan untuk dapat melakukan isolasi mandiri baik di rumah ataupun di tempat-tempat isolasi terpusat yang sudah disediakan," ujarnya.

Menurut Nadia, vaksinasi Covid-19 masih menjadi salah satu upaya penanganan Covid-19 untuk memberikan perlindungan agar terhindar dari keparahan Covid-19. "Untuk itu mari kita ajak lansia untuk mendapatkan vaksinasi, karena saat ini vaksinasi lansia masih cukup rendah baru 55 persen," ujarnya.

Sementara itu Satgas Penanganan Covid-19 menyoroti kenaikan penambahan kasus baru Covid-19 yang melonjak signifikan di beberapa provinsi di Jawa-Bali. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, upaya untuk memperlambat laju penularan kasus saja tidak cukup. Pemda harus berupaya agar tidak ada penambahan kasus dalam dua minggu

ke depan. "Meski berat, Pemda harus mengusahakan agar tidak ada penambahan kasus dalam dua minggu ke depan. Atau kenaikan kasus sama dengan nol," kata Wiku.

Satgas Covid-19 menyebut lonjakan Covid-19 melebihi puncak gelombang pertama. Adapun tiga provinsi di Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam enam minggu terakhir yakni Banten dengan peningkatan 620 kali lipat, Bali 392 kali lipat, dan Jawa Barat 336 kali lipat. Wiku pun menekankan pentingnya ketiga daerah tersebut untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam PPKM Level 3. "Dalam hal ini, kunci utama keberhasilan meniadakan penambahan kasus adalah dengan penerapan protokol kesehatan dengan maksimal," jelas Wiku.

Saat ini, lonjakan penularan Covid-19 masih terpusat di Jawa-Bali. Untuk itu, daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus tinggi harus melakukan langkah pengendalian terutama pengendalian mobilitas. **(Ati)-f**

MENHUB: BIAYA ANGKUT LEBIH RENDAH Pelaku UMKM Agar Manfaatkan Tol Laut

JAKARTA (KR) - Menteri Perhubungan (Memhub) Budi Karya Sumadi mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kapal tol laut karena memiliki keuntungan biaya angkut lebih rendah. Pemerintah bahkan memberikan stimulus potongan biaya angkut 50 persen dari biaya angkutan muatan berangkat, sehingga untuk muatan balik kapal tol laut biayanya bisa lebih rendah lagi.

"Stimulus ini bukan saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah," kata Menhub pada Webinar Bussiness Forum 'Kemudahan Distribusi Logistik Melalui Tol Laut Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)' secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2).

Menhub akan terus mensosialisasikan kemudahan-kemudahan angkutan distribusi barang kepada para pelaku usaha agar bisa memanfaatkannya. "Salah satu tantangan bagi para pelaku usaha lokal salah satunya adalah distribusi logistik yang masih dianggap sulit dan mahal," ujarnya.

Menhub menuturkan, kemudahan lainnya dari program tol laut ini yaitu, pemesanan dan pelacakan pengiriman barang dan untuk memantau disparitas harga antarwilayah di Indonesia, kini bisa diakses melalui platform aplikasi digital yang dibangun Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bernama SiTolaut. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi BRI Store dari PT Bank Rakyat Indonesia.

Plt Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan, program tol laut yang diluncurkan pada 2015 terus mengalami peningkatan dan saat ini telah melayani 34 trayek. Dengan bertambahnya trayek, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jumlah muatannya.

Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan Presiden pada Mei 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada 2023, dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 60 persen. Melalui tol laut, diharapkan semakin meningkatkan jumlah muatan dan semakin mengoptimalkan layanan tol laut. **(Imd)-f**

PREVALENSI PENGGUNA NARKOBA

Naik Jadi 3,66 Juta Jiwa

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengungkapkan, terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.

"Tahun 2021 kami melakukan survei. Itu jadi 1,95 persen, naik 0,15 persen," kata Golose ketika memberikan kuliah umum dan peresmian Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) Bersih Narkoba yang disiarkan di kanal YouTube UNP, seperti dipantau dari Jakarta, Kamis (10/2).

Kepala BNN menyampaikan, sebelumnya, di 2019, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa; sementara prevalensi dunia di 2020 sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan narkotika. Angka prevalensi tersebut merujuk pada masyarakat secara nasional.

"Kita termasuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di bawah angka UNODC (United Nations Office on Drugs

and Crime), namun tetap memprihatinkan bagi kita," ucapnya.

Namun demikian, terdapat penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan meskipun terjadi peningkatan pada prevalensi pengguna narkoba di Indonesia secara umum.

Terkait dengan terminologi waktu pernah memakai narkotika, penurunan prevalensi di desa yang terjadi sebesar 0,27 persen; sehingga turun dari 2,30 persen di 2019 menjadi 2,03 persen pada 2021. Selanjutnya, terkait dengan terminologi waktu setahun terakhir pemakaian narkotika, terdapat penurunan sebesar 0,9 persen, dari 1,70 persen di 2019 menjadi 1,61 persen di 2021. "Ini karena program yang sama-sama juga kami canangkan, bagaimana kita menyerbu dari desa," ujarnya.

Prevalensi adalah jumlah orang memakai narkoba dalam kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal. Angka prevalensi narkotika dapat diukur dalam dua terminologi waktu, yaitu pernah memakai narkotika dan setahun terakhir memakai narkotika. **(Ant)-d**



KR-Sukro Riyadi

HADAPI MUSIM TANAM: Petani melintasi area lahan bawang merah di Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Kamis (10/2). Petani tengah mempersiapkan lahan untuk menghadapi Musim Tanam (MT) I tahun 2022 di wilayah yang merupakan penghasil komoditas bawang merah terbesar di Bantul tersebut.